DAFTAR PUSTAKA

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat. (2023). *Laporan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023*. Simpang Ampek: BKAD Kabupaten Pasaman Barat.

Bastian, I. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Bastian, I. (2022). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Jakarta: Erlangga.

Bili, J. I., & Siswati, S. (2025). Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan APBD Terhadap Kinerja Keuangan pada Dinas Dikpora DIY. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

Bugis, W., et al. (2026). Efektifitas Perencanaan dan Realisasi Anggaran Belanja pada Kantor BAPPEDA Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi*.

Bungin, B. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.

Erlina. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Medan: USU Press.

Fahmi, I. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Habibi, et al. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada Realisasi APBD (Studi Kasus di Kota Surakarta). *Jurnal Manajemen dan Keuangan Daerah*.

Halim, A. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Bunga Rampai). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Halim, A. (2023). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Halim, A., & Abdullah, S. (2020). *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Jones, R. (2021). *Public Sector Accounting*. London: Financial Times Prentice Hall.

Jumaroh, & Sugiharti, R. R. (2021). Efektifitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja: Studi Kasus di BAPPEDA Kab. Temanggung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

K., D. A., et al. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada BAPPEDA Kab. Dompu. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*.

K., G. A. C., et al. (2025). Pengaruh Rasio Ekonomis dan Efisiensi pada Efektivitas Kinerja Keuangan Kota Bandung. *Jurnal Keuangan Publik*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Pengutipan Mutakhir Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Kurrohman, T. (2024). *Penganggaran Sektor Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahmudi. (2021). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2022). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2023). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2025). *Akuntansi dan Penganggaran Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, M. (2024). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mamesah, B. A. (2022). *Sistem Keuangan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.

Mardiasmo. (2022). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2025). *Tata Kelola Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Maududi, M. T. (2025). Studi Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran 2020–2024 BKD Kalimantan Timur. *Jurnal Administrasi Publik*.

Nordiawan, D. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, D. (2023). *Penganggaran dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. (2025). *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Daerah Audited Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022–2025*. Simpang Ampek: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Petra, B. A., & Sari, Y. P. (2021). Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang). *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Terapan*.

Pratama, A. (2023). *Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Robbins, S. P. (2021). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education.

Siagian, S. P. (2022). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siregar, B. (2022). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Siregar, D. (2023). *Manajemen Aset Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suparmoko, M. (2021). *Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: BPFE.

Utomo, H. (2024). *Birokrasi dan Manajemen Keuangan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wardani, D. K. (2025). Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Publik*.

Wati, D. A. A., et al. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Disdukcapil Kabupaten Tegal. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*.